

PENEMUAN HUKUM



ASEP SAPSUDIN

ASEP SAPSUDIN

ISBN 978-623-88754-9-8



9

786238

875498

PENEMUAN HUKUM

Asep Sapsudin



PENEMUAN HUKUM

Penulis : Asep Sapsudin

Editor : M. Taufiq Rahman, Ucep Hermawan

Desain: Leon Rohendi

18,2 x 25,7 B5 (JIS), x x 239, hlm.

Terbit : Sumedang, Mei, 2025

ISBN : 9786238875498

Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja.

Gd. Madrasah Al-Ma'aarij, Darmaraja, Sumedang, 45372

www.penerbityad.com



Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ini, yang berjudul *Penemuan Hukum*, dapat diselesaikan dan hadir di hadapan pembaca. Buku ini lahir dari keinginan penulis untuk memperluas cakrawala pemikiran dalam kajian hukum, terutama dalam hal yang sering kali terlupakan dalam praktik hukum sehari-hari, yaitu penemuan hukum. Penulis percaya bahwa pemahaman yang mendalam tentang penemuan hukum merupakan landasan esensial bagi setiap ilmuwan hukum, mahasiswa, serta para praktisi hukum yang berkomitmen untuk mengembangkan hukum dalam konteks intelektual yang lebih luas dan aplikatif.

Penulisan buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penemuan hukum bukan hanya sekedar proses mekanis dalam memutuskan perkara, tetapi juga sebuah usaha yang menyentuh pada aspek moralitas, keadilan, dan relevansi hukum di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu, buku ini membahas berbagai aspek fundamental penemuan hukum, mulai dari teori-teori dasar yang mendasari penemuan hukum, sejarah perkembangannya, hingga bagaimana proses ini berjalan dalam praktik hukum di berbagai sistem hukum dunia.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang luas bagi para pembaca, terutama mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi hukum, dalam memahami penemuan hukum tidak hanya dari sisi teoritis, tetapi juga dari sudut pandang praktis yang relevan dengan tantangan hukum di dunia modern. Buku ini juga dimaksudkan untuk menjadi inspirasi bagi mereka yang berkomitmen untuk terus menggali dan mengembangkan ilmu hukum dengan pendekatan yang lebih mendalam, kritis, dan berbasis pada nilai-nilai moral yang kuat.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan buku ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan saran dan diskusi yang membangun, serta kepada para praktisi hukum yang telah berbagi pengalaman dan wawasan praktis yang sangat berharga. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah membantu mewujudkan buku ini dengan penuh dedikasi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam memahami penemuan hukum secara lebih komprehensif, serta mendorong pengembangan ilmu hukum yang lebih responsif terhadap perubahan zaman.

Bandung, Februari 2025

Asep Sapsudin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vi
DAFTAR ISI	ix
 SELAYANG PANDANG HUKUM.....	 1
A. Prolog	1
B. Definisi Penemuan Hukum	5
C. Peran Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum	9
 SEJARAH PENEMUAN HUKUM.....	 13
A. Asal-Usul Penemuan Hukum	13
B. Peran hukum dalam masyarakat primitif dan kerajaan-kerajaan kuno 21	
C. Evolusi sistem hukum Barat dan Timur	32
 TEORI-TEORI PENEMUAN HUKUM	 43
A. Positivisme Hukum	43
B. Naturalis Hukum	47
C. Realisme Hukum	51
D. Teori Kritis dan Hukum	60
 PROSES PENEMUAN HUKUM DALAM PRAKTIK.....	 68
A. Penemuan Hukum Oleh Hakim	68
B. Penemuan hukum dalam sistem perundang-undangan	79
C. Peran Interpretasi dalam Penemuan Hukum	89
D. Kasus-Kasus Penting dalam Penemuan Hukum	100
 PENEMUAN HUKUM DALAM BERBAGAI SISTEM HUKUM.....	 117
A. Penemuan Hukum dalam Sistem Common Law	117
B. Penemuan Hukum Dalam Sistem <i>Civil Law</i>	120
C. Penemuan Hukum Dalam Hukum Adat Dan Sistem Hukum Non-Barat 134	
D. Perbandingan Antara Sistem Hukum Barat Dan Timur	154

PENEMUAN HUKUM DALAM ERA MODERN DAN GLOBALISASI.....	169
A. Penemuan Hukum Di Era Globalisasi	169
B. Teknologi Dan Penemuan Hukum.....	173
C. Isu-Isu Kontemporer Dalam Penemuan Hukum	177
D. Peran Pengadilan Internasional	183
 ETIKA DAN KONTROVERSI DALAM PENEMUAN HUKUM	 189
A. Masalah Moralitas Dalam Penemuan Hukum	189
B. Kontroversi Penemuan Hukum	194
C. Penemuan Hukum Dan Keadilan Sosial	200
 REFLEKSI DAN MASA DEPAN PENEMUAN HUKUM.....	 207
A. Perkembangan Masa Depan Penemuan Hukum	207
B. Penemuan Hukum Di Masa Depan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat.....	212
HUKUM, KINI DAN NANTI.....	217
 DAFTAR PUSTAKA.....	 222

SELAYANG PANDANG HUKUM

A. Prolog

Tujuan utama buku ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, teori, dan praktik penemuan hukum. Penemuan hukum, sebagai salah satu aspek paling dinamis dalam sistem hukum, tidak hanya melibatkan penerapan norma hukum yang sudah ada tetapi juga mencakup proses interpretasi memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih luas tentang peran penemuan hukum dalam mendukung keadilan dan kepastian hukum (Hutagalung, 2022).

Penemuan hukum memiliki relevansi yang besar dalam sistem hukum Indonesia dan inovasi yang dilakukan oleh hakim, pembuat undang-undang, maupun pihak-pihak lain yang berperan dalam sistem hukum (Vermeule, 2006). Buku ini ditujukan untuk mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi hukum yang ingin memahami lebih jauh mengenai bagaimana hukum dapat ditemukan, dikembangkan, dan diadaptasi untuk menjawab tantangan-tantangan kontemporer.

Ruang lingkup buku ini meliputi pembahasan mengenai asal-usul penemuan hukum, teori-teori utama yang mendasari konsep penemuan hukum, hingga praktik dan relevansinya di era modern. Buku ini juga menyoroti penemuan hukum dalam berbagai sistem hukum dunia, seperti sistem *Common Law*, *Civil Law*, dan hukum adat, serta peran teknologi dalam proses penemuan hukum di era globalisasi. Melalui pendekatan yang komprehensif, buku ini berupaya. Dengan perkembangan hukum yang



senantiasa mengikuti dinamika kehidupan masyarakat, proses penemuan hukum menjadi suatu keniscayaan dalam menjawab persoalan-persoalan yang belum diatur oleh norma tertulis (Nugraheni et al., 2010). Contohnya, dalam kasus hukum adat di Indonesia, penemuan hukum sering kali diperlukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan sistem hukum nasional. Hal ini memperlihatkan bagaimana penemuan hukum berfungsi untuk menjembatani antara hukum yang berlaku secara tertulis dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat (Badriyah, 2022).

Selain itu, Ronald Dworkin (1986) menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral dalam proses penemuan hukum. Menurutnya, hukum bukanlah



sekadar kumpulan aturan yang statis, melainkan suatu upaya yang melibatkan interpretasi mendalam untuk mencapai keadilan substantif. Hal ini relevan dalam konteks praktik hukum modern, di mana hakim dihadapkan pada kasus-kasus yang melibatkan dimensi etis dan moral yang kompleks. Dengan kata lain, penemuan hukum tidak hanya bersifat teknis tetapi juga

filosofis, karena memerlukan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip moral yang mendasari sistem hukum (Dworkin, 1986a).

Lebih lanjut, ruang lingkup buku ini juga mencakup analisis komparatif terhadap sistem hukum di berbagai negara. Dalam sistem *Common Law*, misalnya, penemuan hukum lebih berfokus pada preseden yang ditetapkan oleh pengadilan. Hakim memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan hukum melalui putusan-putusan mereka. Sementara itu, dalam sistem *Civil Law*, penemuan hukum cenderung berpusat pada

interpretasi undang-undang yang telah ada. Namun, kedua sistem tersebut sama-sama menegaskan pentingnya kreativitas dalam proses penemuan hukum, terutama dalam menghadapi situasi di mana norma hukum yang ada tidak lagi memadai (Santos, 2002).

Penemuan hukum juga memiliki implikasi yang luas dalam konteks globalisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncul berbagai isu hukum baru yang memerlukan solusi inovatif. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan teknologi blockchain atau kecerdasan buatan, penemuan hukum menjadi krusial untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Havel dan Sanchez (2014) menyoroti bagaimana hakim dan pembuat undang-undang harus bersikap proaktif dalam menemukan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu (Havel & Sanchez, 2014).

Selain itu, buku ini juga membahas peran teknologi dalam mempermudah proses penemuan hukum. Di era digital, teknologi telah memungkinkan akses yang lebih luas terhadap sumber-sumber hukum, seperti putusan pengadilan, doktrin, dan peraturan perundang-undangan (Brown & Marsden, 2023). Dengan demikian, proses penemuan hukum menjadi lebih efisien dan transparan. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan baru, seperti perlunya pengaturan hukum terhadap privasi data dan hak digital (Brownsword & Goodwin, 2012). Dalam hal ini, penemuan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik.

Secara khusus, buku ini juga menguraikan peran penemuan hukum dalam mendukung tercapainya keadilan substantif. Ketika hukum tertulis tidak mampu memberikan solusi yang adil, hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum umum, seperti asas keadilan dan kepatutan, untuk menemukan

hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Pound (1921) yang menekankan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya (Pound, 1921).

Dengan demikian, tujuan dan ruang lingkup buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang holistik mengenai penemuan hukum sebagai proses yang dinamis dan kompleks. Melalui analisis teoritis dan empiris, buku ini berupaya menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum di era modern. Dengan memahami peran penemuan hukum dalam berbagai konteks, diharapkan pembaca dapat mengapresiasi pentingnya proses ini dalam mendukung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Lebih jauh lagi, buku ini bertujuan untuk mendorong pemikiran kritis di kalangan mahasiswa dan praktisi hukum. Dalam praktiknya, penemuan hukum sering kali melibatkan dilema-dilema etis dan interpretatif yang memerlukan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya menyajikan teori-teori penemuan hukum, tetapi juga contoh-contoh kasus konkret yang dapat menjadi bahan diskusi dan refleksi (Markovits, 2011). Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang bagaimana hukum ditemukan, dikembangkan, dan diterapkan dalam kehidupan nyata.

Sebagai penutup dari bagian ini, penting untuk menegaskan bahwa penemuan hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga relevansi dan efektivitas hukum dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan teknologi (Simon, 2009). Dengan memahami proses penemuan hukum, kita dapat melihat bagaimana hukum bukanlah

entitas yang statis, melainkan suatu mekanisme yang terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah.

B. Definisi Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merujuk pada proses di mana norma-norma hukum diterapkan, diinterpretasikan, atau bahkan diciptakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang spesifik (Hamid, 2022). Dalam konteks ini, penemuan hukum bukan hanya sekadar penerapan aturan yang ada, tetapi merupakan sebuah proses dinamis yang menuntut pemahaman mendalam dan penyesuaian terhadap perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, Sudikno Mertokusumo dalam karyanya yang berjudul *Penemuan Hukum* menyebutkan bahwa penemuan hukum adalah *"proses pembentukan hukum oleh hakim atau pejabat hukum lain melalui interpretasi terhadap peraturan hukum yang ada untuk diterapkan dalam kasus konkret"* (Sweet, 2004).



Definisi ini menunjukkan bahwa penemuan hukum bukan hanya sekadar penerapan mekanis atas aturan yang sudah ada, tetapi juga mencakup elemen-elemen kreatif yang bertujuan untuk mencocokkan norma-norma hukum dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah (Poesoko & Dewi, 2020). Dalam hal ini, penemuan hukum melibatkan suatu tafsiran yang bukan hanya terbatas pada teks yang ada, tetapi juga pada suatu upaya mengakomodasi nilai-nilai sosial yang relevan dalam kehidupan masyarakat.

Ronald Dworkin, dalam bukunya *Law's Empire* (1986), menekankan bahwa penemuan hukum adalah "*proses konstruktif di mana hakim menafsirkan hukum tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga melalui prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang relevan*" (Dworkin, 1986b). Pemikiran Dworkin mengajak kita untuk melihat peran hakim sebagai lebih dari sekadar penerap hukum yang bersifat mekanis, tetapi juga sebagai agen inovasi yang mempengaruhi perkembangan hukum. Hakim, dalam pandangan Dworkin, bertindak tidak hanya sebagai eksekutor dari hukum yang tertulis, tetapi juga sebagai kreator yang membangun hukum melalui interpretasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang lebih luas. Dworkin menjelaskan bahwa dalam setiap keputusan hukum, hakim harus mencermati prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia yang terkandung dalam tradisi hukum dan budaya moral yang lebih besar (Dworkin, 1986a). Oleh karena itu, penemuan hukum dalam kerangka ini adalah sebuah proses yang terus berkembang, mengingat bahwa norma-norma hukum senantiasa harus relevan dengan realitas sosial yang ada.

Penemuan hukum, dalam kerangka ini, tidak hanya terbatas pada interpretasi terhadap hukum tertulis, tetapi juga mencakup proses analogi dan konstruksi hukum (Rubenfeld, 2005). Interpretasi adalah metode untuk memahami makna norma hukum yang ada, sedangkan analogi digunakan ketika tidak ada aturan yang secara langsung mengatur suatu kasus atau permasalahan hukum yang muncul (Susilo et al., 2024). Di sini, hakim dituntut untuk merujuk pada prinsip atau norma hukum yang sudah ada, untuk menemukan kesamaan dengan kasus yang sedang dihadapi dan menarik kesimpulan yang relevan. Dalam hal ini, analogi memberikan fleksibilitas bagi penemuan hukum, karena memungkinkan hukum berkembang meskipun tidak ada aturan yang eksplisit yang mengatur situasi tersebut.

Konstruksi hukum, di sisi lain, merujuk pada proses di mana hakim atau pembuat hukum menambahkan makna atau aturan baru untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang mungkin ada (Wróblewski, 2013). Konstruksi ini sangat penting karena dalam setiap perkembangan masyarakat, selalu ada situasi baru yang tidak sepenuhnya tercakup dalam norma hukum yang ada, dan di sinilah peran penemuan hukum menjadi semakin krusial. Dalam hal ini, penemuan hukum bukan hanya sekadar menerjemahkan aturan, tetapi juga menciptakan aturan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Schauer, 2009).

Penemuan hukum, menurut teori ini, tidak bisa terlepas dari proses dinamis yang terjadi dalam masyarakat. Proses ini mencakup interaksi yang erat antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Di Indonesia, misalnya, hukum adat sering kali diakui sebagai salah satu sumber hukum yang diakui oleh negara. Hal ini memberikan dimensi tambahan dalam penemuan hukum, di mana norma-norma adat yang berkembang dalam masyarakat lokal harus diterjemahkan ke dalam kerangka hukum nasional yang lebih formal (Aditya, 2019). Proses ini memerlukan sebuah pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal yang terkandung dalam norma adat, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar keadilan yang bersifat universal (Havel & Sanchez, 2014). Norma-norma adat yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat sering kali tidak tertulis dan bisa sangat beragam, tergantung pada daerah atau budaya setempat. Oleh karena itu, dalam penemuan hukum, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengharmoniskan norma-norma tersebut dengan prinsip hukum yang lebih luas dan dapat diterima secara nasional. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan tanah adat atau pernikahan adat, sering kali terdapat perbedaan antara aturan hukum yang berlaku di tingkat nasional dan praktek-praktek adat yang telah berlangsung lama di masyarakat.

Salah satu contoh nyata dari pentingnya penemuan hukum dalam konteks hukum adat adalah dalam pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum nasional (Oguamanam, 2006). Di Indonesia, meskipun negara telah mengakui hak-hak masyarakat adat melalui berbagai undang-undang dan keputusan pengadilan, implementasi dan penegakan hak-hak tersebut sering kali terhambat oleh ketidakpahaman atau ketidaksesuaian antara norma hukum adat dengan hukum positif yang berlaku (Miller, 2010). Dalam hal ini, hakim atau pembuat hukum harus menggunakan pendekatan penemuan hukum untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, dengan cara menafsirkan atau menciptakan norma baru yang dapat mengakomodasi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat tersebut (Åhrén, 2016). Oleh karena itu, penemuan hukum bukan hanya mengenai penerapan aturan yang sudah ada, tetapi juga mencakup proses interaktif di mana hakim atau pembuat hukum berperan sebagai penghubung antara tradisi lokal dan sistem hukum yang lebih besar (Tobin, 2014).

Lebih jauh lagi, penemuan hukum juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan perkembangan zaman. Seiring berjalannya waktu, norma-norma hukum yang ada mungkin tidak lagi mampu mengatasi masalah hukum yang timbul akibat perubahan sosial yang pesat (Friedmann, 2023). Sebagai contoh, dalam era digital ini, munculnya teknologi baru seperti internet dan kecerdasan buatan menimbulkan tantangan baru dalam penemuan hukum, di mana hukum yang ada belum sepenuhnya siap untuk mengatur fenomena-fenomena baru ini (Berman, 2003). Dalam hal ini, penemuan hukum menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, di mana pembuat hukum harus beradaptasi dengan realitas baru dan merumuskan aturan yang relevan dengan konteks sosial yang berkembang. Ini adalah contoh dari proses dinamis penemuan hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai penerapan aturan yang ada, tetapi juga sebagai

alat untuk menciptakan hukum yang relevan dengan perubahan zaman (Sorokin, 2017).

Dengan begitu penemuan hukum adalah sebuah proses yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari interpretasi dan analogi terhadap norma hukum yang ada, hingga penciptaan aturan baru untuk mengatasi kekosongan hukum. Dalam proses ini, peran hakim dan pembuat hukum sebagai inovator sangat penting, terutama dalam konteks masyarakat yang terus berkembang dan menghadapi tantangan baru. Hukum bukanlah sistem statis, melainkan suatu entitas yang terus berkembang untuk mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang ada (Sorokin, 2017).

C. Peran Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum

Penemuan hukum memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan relevansi sistem hukum. Proses ini bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan kasus-kasus konkret, tetapi juga memastikan bahwa hukum tetap responsif terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Penemuan hukum, dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai mekanisme yang memungkinkan sistem hukum untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman yang terus berkembang (Wolfrum & Matz, 2003).

Dalam sistem *Common Law*, penemuan hukum sangat bergantung pada peran hakim yang aktif dalam mengembangkan dan menafsirkan hukum melalui prinsip *stare decisis*, atau preseden. Doktrin ini menyatakan bahwa keputusan hakim pada kasus sebelumnya harus diikuti dalam kasus-kasus yang serupa di masa depan (Holmes Jr, 1923). Dalam sistem ini, hakim bukan hanya bertindak sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai pengembang hukum. Mereka terlibat dalam proses penemuan hukum yang berkelanjutan,

yang memungkinkan hukum untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang ada. Proses ini menciptakan stabilitas dalam sistem hukum, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk menanggapi kasus-kasus baru yang muncul di masyarakat. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang belum pernah dihadapi sebelumnya, hakim dapat merujuk pada preseden dan prinsip-prinsip hukum yang lebih umum untuk menemukan solusi yang sesuai (Scotford, 2017).



Sebaliknya, dalam sistem *Civil Law*, proses penemuan hukum lebih berfokus pada interpretasi undang-undang yang ada. Dalam sistem ini, hakim tidak memiliki kebebasan yang sama seperti dalam *Common Law* untuk menciptakan hukum baru

melalui preseden. Sebagai gantinya, mereka berupaya menemukan makna yang paling tepat dari norma yang sudah ada untuk diterapkan pada kasus yang dihadapi (J. H. Merryman, 1998). Meskipun demikian, meskipun peran hakim dalam *Civil Law* lebih terbatas, mereka tetap memiliki ruang untuk berkreasi dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) (Pleasence et al., 2006). Dalam hal ini, penemuan hukum tetap berperan penting dalam memastikan bahwa hukum tetap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, meskipun undang-undang yang berlaku tidak memberikan jawaban yang jelas. Oleh karena itu, meskipun sistem *Civil Law* menekankan pada peraturan tertulis, peran hakim dalam penemuan hukum tetap tak bisa dipandang remeh (Schäfer & Ott, 2022).

Peran penemuan hukum menjadi semakin signifikan seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi. Isu-isu baru yang muncul akibat kemajuan teknologi, seperti teknologi *blockchain*, kecerdasan buatan, dan hak digital, sering kali tidak tercakup oleh undang-undang yang sudah ada (Werksman et al., 2014). Sebagai contoh, hak atas data pribadi, transaksi digital, atau penggunaan teknologi dalam ruang publik belum sepenuhnya diatur oleh hukum yang ada di banyak negara (Havel & Sanchez, 2014). Dalam kondisi seperti ini, penemuan hukum menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum. Hakim dan pembuat undang-undang dihadapkan pada tantangan untuk menemukan norma-norma baru yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum tetapi juga melindungi hak-hak individu dan masyarakat dalam menghadapi perubahan teknologi yang pesat (Voigt, 2013). Oleh karena itu, proses penemuan hukum berperan krusial dalam memastikan bahwa hukum tetap relevan dalam menghadapi inovasi teknologi yang terus berkembang.

Selain itu, penemuan hukum juga memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya keadilan substantif (Havel & Sanchez, 2014).. Dalam praktiknya, tidak semua masalah hukum dapat diselesaikan hanya dengan menerapkan peraturan yang ada secara kaku. Ketika undang-undang yang berlaku tidak memberikan solusi yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus, hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum umum seperti prinsip equity untuk menemukan solusi yang lebih adil (MacCormick, 2005). Dengan demikian, penemuan hukum tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif yang mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat (Pound, 1921). Dalam hal ini, penemuan hukum menjadi sarana untuk mengatasi ketidakadilan yang mungkin timbul akibat penerapan hukum yang terlalu kaku atau tidak sesuai dengan realitas sosial.

Penemuan hukum, dalam pengertian yang lebih luas, berfungsi untuk menjaga dinamika hukum agar tetap responsif terhadap perubahan zaman. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh sistem hukum saat ini adalah bagaimana mengakomodasi nilai-nilai baru yang berkembang di masyarakat (Peerenboom, 2002). Dalam konteks ini, peran hakim dan pembuat hukum menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya dapat menyelesaikan konflik yang ada tetapi juga dapat mencegah ketidakadilan yang mungkin timbul di masa depan (Dworkin, 2013). Proses penemuan hukum dengan demikian tidak hanya terkait dengan teori hukum, tetapi juga dengan upaya praktis untuk menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam masyarakat (Cullinan, 2011).

Pada akhirnya, penemuan hukum memegang peran yang fundamental dalam menciptakan sistem hukum yang adil, dinamis, dan responsif terhadap perubahan sosial. Melalui interpretasi, analogi, dan konstruksi hukum, serta penggunaan prinsip-prinsip equity dan keadilan, hakim dan pembuat hukum dapat menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul dalam masyarakat (Upham, 2009). Dengan demikian, penemuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa hukum tetap hidup, relevan, dan efektif dalam mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh masyarakat (Pound, 1921).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal-Haqq, I. (2002). Islamic law-an overview of its origin and elements. *J. Islamic L. & Culture*, 7, 27.
- Abdullah, T. (1987). *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. LP3ES.
- Abdullah, T. (2024). *Sejarah lokal di Indonesia*. UGM PRESS.
- Abel, R. L., & Lewis, P. S. C. (1988). *Lawyers in society: the civil law world*. Beard Books.
- Abulhab, S. D. (2017). *The Law Code of Hammurabi: Transliterated and Literally Translated from Its Early Classical Arabic Language*. Blautopf Publishing.
- Ackerman, B. A. (2001). *What Brown v. Board of Education should have said: The nation's top legal experts rewrite America's landmark civil rights decision*. NYU Press.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37–54.
- Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (1972). *The culture industry*. na.
- Aguiar, A. S. (2012). The law applicable to international trade transactions with Brazilian parties: a comparative study of the Brazilian law, the CISG, and the american law about contract formation. *Revista Brasileira de Arbitragem*, 9(33).
- Åhrén, M. (2016). *Indigenous peoples' status in the international legal system*. Oxford University Press.
- Albarran, A. B. (2023). *The media economy*. Routledge.
- Alfange Jr, D. (1993). Marbury v Madison and Original Understandings of Judicial Review: In Defense of Traditional Wisdom. *The Supreme Court Review*, 1993, 329–446.
- Althusser, L. (1971). A letter on art in reply to André Daspre. *Lenin and Philosophy and Other Essays*, 201–208.
- Ananyeva, A. A. (2015). Methodological approaches to studying civil-LAW legal constructions. *Perm U. Herald Jurid. Sci.*, 30, 28.
- Aquinas, S. T. (2013). *Summa Theologica, Volume I*. Cosimo, Inc.
- Aquinas, S. T. (2014). *The summa theologica: Complete edition*. Catholic Way Publishing.
- Aquinas, T. (1945). *Summa Theologica: Vol. II*. Burns Oates & Washbourne.
- Arifudin, N., Jufrin, J., Asriyani, A., Narwadan, T. N. A., Pusvita, D. E., Abqa, M. A. R., Satrul, H. S., Syarif, M., Rohayati, A. C., & Hermawan, I. A. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Aristotle, 3. (2006). *Nicomachean ethics*. ReadHowYouWant. com.
- Ashe, M. (1995). *Legal Studies as Cultural Studies: a reader in (post) modern critical theory*. SUNY Press.
- Ashenfelder, O., Collins, W. J., & Yoon, A. (2006). Evaluating the role of Brown v. Board of Education in school equalization, desegregation, and the income of African Americans. *American Law and Economics Review*, 8(2), 213–248.
- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatik*. Sinar

Grafika.

- Baker, P. F., Hodgkin, A. L., & Ridgway, E. B. (1971). Depolarization and calcium entry in squid giant axons. *The Journal of Physiology*, 218(3), 709–755.
- Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Bloomsbury Publishing.
- Banathy, B. H. (2013). *Designing social systems in a changing world*. Springer Science & Business Media.
- Barmash, P. (2020). *The laws of Hammurabi: at the confluence of royal and scribal traditions*. Oxford University Press.
- Barrett, D. (2010). Security, development and human rights: Normative, legal and policy challenges for the international drug control system. *International Journal of Drug Policy*, 21(2), 140–144.
- Barrett, G. (2003). Re-examining the Concept and Principle of Equality in EC Law. *Yearbook of European Law*, 22(1), 117.
- Barrie, G. N. (2015). Brown v Board of Education 1954-2014: sixty years of unfulfilled expectations. *Journal of South African Law/Tydskrif Vir Die Suid-Afrikaanse Reg*, 2015(1), 160–170.
- Barton, D., & Hamilton, M. (2012). *Local literacies: Reading and writing in one community*. routledge.
- Beatley, T. (1994). *Ethical land use: Principles of policy and planning*. Johns hopkins university press.
- Bell, B. W. (2003). Marbury v. Madison and the Madisonian Vision. *Geo. Wash. L. Rev.*, 72, 197.
- Benhabib, S. (1986). *Critique, norm, and utopia: A study of the foundations of critical theory*. Columbia University Press.
- Benjamin, L. T., & Crouse, E. M. (2004). *The American Psychological Association's response to Brown v. Board of Education: The case of Kenneth B. Clark*.
- Bentham, J. (1789). From An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Printed in the Year 1780, and Now First Published. In *Literature and Philosophy in Nineteenth Century British Culture* (pp. 261–268). Routledge.
- Berman, H. J. (2003). *Law and revolution, II: the impact of the protestant reformations on the western legal tradition*. Harvard University Press.
- Bhatia, V. P. (2016). *Ethical and spiritual values in Indian scriptures*. Notion Press.
- Binns, A., & Griffin, C. (2023). The Missing Discipline Behind Failure to Scale. *MIT Sloan Management Review*, 64(3), 1–7.
- Binns, M. G. (2023). *Relationship Between the i-Ready Data and the Standardized Test Data for Lakemore K-8 School*. St. Thomas University.
- Bloch, E. (1986). *Natural law and human dignity*. Mit Press.
- Boas, F. (1911). *Introduction [to Handbook of American Indian Languages]* (Issue 677). US Government Printing Office.
- Boas, F. (1989). *A Franz Boas reader: the shaping of American anthropology, 1883-1911*. University of Chicago Press.
- Boas, G. (2012). *Public international law: contemporary principles and perspectives*. Edward Elgar Publishing.
- Bodde, D., & Morris, C. (1967). *Law in Imperial China: exemplified by 190 Ch'ing*

- Dynasty cases (translated from the Hsing-an hui-lan), with historical, social, and juridical commentaries.* Harvard University Press.
- Bratspies, R. M. (2006). The new discovery doctrine: Some thoughts on property rights and traditional knowledge. *American Indian Law Review*, 31(2), 315–340.
- Brazil, W. D. (1980). Civil Discovery: Lawyers' Views of Its Effectiveness, Its Principal Problems and Abuses. *American Bar Foundation Research Journal*, 5(4), 787–902.
- Bridle, J. (2018). *New dark age: Technology and the end of the future*. Verso Books.
- Brown, A. (2015). *Hate speech law: A philosophical examination*. Taylor & Francis.
- Brown, D. K. (1996). Jury nullification within the rule of law. *Minn. L. Rev.*, 81, 1149.
- Brown, I. (2022). Challenging Racial Segregation through the Courts. *Social Justice Pedagogy Across the Curriculum: The Practice of Freedom*.
- Brown, I., & Marsden, C. T. (2023). *Regulating code: Good governance and better regulation in the information age*. MIT Press.
- Brown, J. (2022a). The mouse and the snail: reappraising the significance of *Donoghue v Stevenson* part I-a case worth celebrating? *Scots Law Times*, 2022(35), 229–234.
- Brown, J. (2022b). The mouse and the snail: reappraising the significance of *Donoghue v Stevenson* part IV-‘remoteness’, not ‘duty’. *Scots Law Times*.
- Brown, R. A. (1929). Police Power. Legislation for Health and Personal Safety. *Harvard Law Review*, 42(7), 866–898.
- Brown, R. B., & Kimball, B. A. (2001). When Holmes Borrowed from Langdell: The “Ultra Legal” Formalism and Public Policy of Northern Securities (1904). *American Journal of Legal History*, 45(3), 278–321.
- Brown, R. L. (1991). Separated Powers and Ordered Liberty. *University of Pennsylvania Law Review*, 139(6), 1513–1566.
- Brown, R. L. (1993). Tradition and Insight. *The Yale Law Journal*, 103(1), 177–222.
- Brown, R. L. (2017). Accountability, liberty, and the Constitution. In *Bills of Rights* (pp. 49–98). Routledge.
- Browning, D. S., & Clairmont, D. A. (2006). *American religions and the family: How faith traditions cope with modernization and democracy*. Columbia University Press.
- Brownsword, R., & Goodwin, M. (2012). *Law and the Technologies of the Twenty-first Century: Text and Materials*. Cambridge University Press.
- Bryant, T. (2005). *The Life and Times of Hammurabi*. Mitchell Lane Publishers, Inc.
- Buchanan, I. (2018). *A dictionary of critical theory*. Oxford University Press.
- Buckland, R. (1986). *Buckland's complete book of witchcraft*. Llewellyn Worldwide.
- Bühler, K. G. (2001). *State succession and membership in international organizations: legal theories versus political pragmatism* (Vol. 38). Martinus Nijhoff Publishers.
- Buhler, S. (2017). Don't want to get exposed: Law's violence and access to justice. *Journal of Law and Social Policy*, 26, 68.
- Burki, T. (2021). European Commission classifies obesity as a chronic disease. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 9(7), 418.

- Burton, H. H. (1950). The Cornerstone of Constitutional Law: The Extraordinary Case of *Marbury v. Madison*. *American Bar Association Journal*, 805–883.
- Campbell, T. D. (2016). *The legal theory of ethical positivism*. Routledge.
- Capeheart, L., & Milovanovic, D. (2020). *Social justice: Theories, issues, and movements (Revised and expanded edition)*. Rutgers University Press.
- Cates, D. (2012). *Plessy v. ferguson: segregation and the separate but equal policy: segregation and the separate but equal policy*. ABDO.
- Chen, J. (1999). *Chinese law: Towards an understanding of Chinese law, its nature and developments (Vol. 3)*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Chernilo, D. (2013). *The natural law foundations of modern social theory: A quest for universalism*. Cambridge University Press.
- Clark, C. E. (1973). *A History of Lumbering In Maine, 1820–1861*. By Richard G. Wood and *A History of Lumbering In Maine, 1861–1960*. By David C. Smith. Duke University Press.
- Clinton, R. (1989). The strange history of *Marbury v. Madison* in the Supreme Court of the United States. . . *Louis U. Pub. L. Rev.*, 8, 13.
- Clinton, R. L. (1989). *Marbury v. Madison and judicial review*. University Press of Kansas.
- Clinton, R. N. (1986). Original Understanding, Legal Realism, and the Interpretation of 'This Constitution'. *Iowa L. Rev.*, 72, 1177.
- Combs, M. W., & Combs, G. M. (2003). Revisiting brown v. board of education: A cultural, historical-legal, and Political Perspective. *Howard LJ*, 47, 627.
- Conklin, W. E. (2012). *The invisible origins of legal positivism: A re-reading of a tradition (Vol. 52)*. Springer Science & Business Media.
- Cook-Kwenda, M. (2024). *Tech-Enabled Global Cybercrime: Exploitation by Transnational Criminal Organizations (TCOS)*.
- Cook, S. A. (2010). *The laws of Moses and the code of Hammurabi*. Cosimo, Inc.
- Cornish, E. (2004). *Futuring: The exploration of the future*. World Future Society.
- Cotterrell, R. (1995). *Law's community: legal theory in sociological perspective*. Oxford University Press.
- Crawford, J., Cowling, M., & Allen, K.-A. (2023). Leadership is needed for ethical ChatGPT: Character, assessment, and learning using artificial intelligence (AI). *Journal of University Teaching & Learning Practice*, 20(3), 2.
- Cullinan, C. (2011). *Wild law: A manifesto for earth justice*. Bloomsbury Publishing.
- d'Entreves, A. P. (2017). *Natural law: An introduction to legal philosophy*. Routledge.
- Dagan, H. (2007). The realist conception of law. *U. Toronto LJ*, 57, 607.
- David, R., & Brierley, J. E. C. (1978). *Major legal systems in the world today: an introduction to the comparative study of law*. Simon and Schuster.
- De Hert, P. J. A. (2005). Balancing security and liberty within the European human rights framework. A critical reading of the Court's case law in the light of surveillance and criminal law enforcement strategies after 9/11. *Utrecht Law Review*, 68–96.
- Derrett, J. D. M. (1975). Further Light on the Narratives of the Nativity. *Novum Testamentum*, 81–108.
- Derrida, J. (1992). The Other Heading: Reflections on Today's Europe. *Indiana UP*.

- Dib, O., Brousmiche, K.-L., Durand, A., Thea, E., & Hamida, E. Ben. (2018). Consortium blockchains: Overview, applications and challenges. *Int. J. Adv. Telecommun*, 11(1), 51–64.
- Domat, J. (1853). *The civil law in its natural order* (Vol. 1). Рипол Классик.
- Domingo, R. (2018). *Roman law: an introduction*. Routledge.
- Drewes, G. W. J. (1968). *The Struggle between Javanism and Islam as Illustrated by the Serat Dermagandul*. Martinus Nijhoff.
- Driver, G. R., & Miles, J. C. (1939). The Sal-Zikrum ‘Woman-Man’ in Old-Babylonian Texts. *Iraq*, 6(1), 66–70.
- Durkheim, E. (2018). The division of labor in society. In *Social stratification* (pp. 217–222). Routledge.
- Durkheim, E. (2023). The division of labour in society. In *Social Theory Re-Wired* (pp. 15–34). Routledge.
- Durkheim, É. (1912). *The Elementary Forms of the Religious Life*. Free Press.
- Dworkin, R. (1986a). *Law’s Empire*. Harvard University Press.
- Dworkin, R. (1986b). *Law’s Empire*. Harvard University Press.
- Dworkin, R. (1986c). *Law’s Empire*. Belknap Press.
- Dworkin, R. (1986d). *Law’s Empire*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Dworkin, R. (1996). 3. From principles to institutions. *Constitution (Oxford University Press 1996)*, 1(38), 73.
- Dworkin, R. (2013). Law’s Empire. *Pravovedenie*, 195.
- Dyzenhaus, D. (1997). *Legality and Legitimacy: Carl Schmitt*. Hans Kelsen and Hermann Heller in Weimar. Oxford University Press.
- Eagleton, T. (2009). *Reason, faith, and revolution: Reflections on the God debate*. Yale University Press.
- Ehighalua, D. D. (2013). Where did the Donoghue v. Stevenson Decision Come From? A Jurisprudential Inquiry. *Stevenson Decision Come From*.
- Ehimuan, B., Chimezie, O., Akagha, O. V., Reis, O., & Oguejiofor, B. B. (2024). Global data privacy laws: A critical review of technology’s impact on user rights. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 21(2), 1058–1070.
- Elias, T. O. (1956). *The nature of African customary law*. Manchester University Press.
- Ellington, S. B. (1992). United States v. Noriega as a Reason for an International Criminal Court. *Dick. J. Int’l L*, 11, 451.
- Evans-Pritchard, E. E. (1940). *The Nuer: A description of the modes of livelihood and political institutions of a Nilotic people*. Clarendon Press.
- Ezzamel, M. (2024). *The Economy of Ancient Egypt: State, Administration, Institutions*. Taylor & Francis.
- Fallon Jr, R. H. (2003). Marbury and the Constitutional Mind: A Bicentennial Essay on the Wages of Doctrinal Tension. *Calif. L. Rev.*, 91, 1.
- Fathurrahman, I. (2020). *Warisan dan Hukum Waris dalam Hukum Islam*. Alfabeta.
- Fathurrahman, I. (2021). The Relevance of Civil Law and Common Law Systems in Regulating Standard Contract Law in Indonesia. *Legal Reconstruction in Indonesia Based on Human Right*.
- Ferrari, F. (1994). Donoghue v. Stevenson’s 60th Anniversary. *Ann. Surv. Int’l & Comp. L.*, 1, 81.

- Finnis, J. (2005). *Aquinas' moral, political, and legal philosophy*.
- Finnis, J. (2011). *Natural law and natural rights*. Oxford University Press.
- Fiss, O. M. (1979). Foreword: The forms of justice. *Harv. L. Rev.*, 93, 1.
- Fjelstad, P. (1994). Legal judgment and cultural motivation: Enthymematic form in *Marbury v. Madison*. *Southern Journal of Communication*, 60(1), 22–32.
- Ford, L. (2021). *The King's Peace: Law and Order in the British Empire*. Harvard University Press.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon Books.
- Fourie, E. (2021). Social protection instruments and women workers in the informal economy: A Southern African perspective. *Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad*, 24(1).
- Frank, J. (1949). *Courts on Trial: Myth and Reality in American Justice*. Princeton University Press.
- Frank, J., & Bix, B. H. (2017). *Law and the modern mind*. Routledge.
- Frankfort, H. (1948). *Ancient Egyptian religion: an interpretation*. Columbia University Press.
- Fraser, N., & Naples, N. A. (2004). To interpret the world and to change it: An interview with Nancy Fraser. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 29(4), 1103–1124.
- Friedmann, W. (2023). *Law in a changing society*. Univ of California Press.
- Fuller, L. L. (1933). American legal realism. *U. Pa. L. Rev.*, 82, 429.
- Furlani, G. (1956). *The Babylonian laws edited with translation and commentary, Volume II: Transliterated text, Translation, Philological notes, Glossary*. JSTOR.
- Gadalla, M. (2016). *Egyptian cosmology: The animated universe*. Moustafa Gadalla.
- Girasa, R. (2020). *Artificial intelligence as a disruptive technology: Economic transformation and government regulation*. Springer Nature.
- Girasa, R., & Scalabrini, G. J. (2022). *Regulation of innovative technologies: blockchain, artificial intelligence and quantum computing*. Springer Nature.
- Glynos, J., & Howarth, D. (2007). *Logics of critical explanation in social and political theory*. Routledge.
- Goh, B. C., & Round, T. (2017). Wild negligence: *Donoghue v Stevenson*. In *Law as if Earth Really Mattered* (pp. 91–106). Routledge.
- Goldstein, A. K. (1981). A Short History of Discovery. *Anglo-American Law Review*, 10(4), 257–270.
- Goodrich, P. (1999). Anti-Teubner: autopoiesis, paradox, and the theory of law. *Social Epistemology*, 13(2), 197–214.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Green, B. A. (2012). Federal Criminal Discovery Reform: A Legislative Approach. *Mercer L. Rev.*, 64, 639.
- Green, D. (2022). *Review Article of Recht und Sprache in der Praxis/Law and Language in Practice (Facultas 2021)*. Springer.
- Green, M. S. (2004). Legal realism as theory of law. *Wm. & Mary L. Rev.*, 46, 1915.
- Greitens, S. C. (2020). Surveillance, security, and liberal democracy in the post-COVID world. *International Organization*, 74(S1), E169–E190.
- Grover, L. (2019). Transitional justice, international law and the United Nations.

- Nordic Journal of International Law*, 88(3), 359–397.
- Guinier, L. (2004). From racial liberalism to racial literacy: *Brown v. Board of Education* and the interest-divergence dilemma. *The Journal of American History*, 91(1), 92–118.
- Habermas, J. (1984). The theory of communicative action, Vol. I. *Boston: Beacon*.
- Haggard, T. R. (1993). *Marbury v. Madison: A Concurring/Dissenting Opinion. JL & Pol.*, 10, 543.
- Hall, M. A., & Wright, R. F. (2008). Systematic content analysis of judicial opinions. *Calif. L. Rev.*, 96, 63.
- Hallaq, W. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press.
- Hameed, H. A., & Dahlan, N. H. bin M. (2017). The Hague Invasion Act And International Criminal Justice: The Attitude Of The United States Towards The International Criminal Court (ICC). *JL Pol'y & Globalization*, 62, 89.
- Hamid, A. (2022). Abdullah Saeed's Progressive Ijtihad in the Application of Rechtsvinding Judges in Religious Courts. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(2), 1–17.
- Hamid, A., Aldila, M. R., & Intan, A. M. (2022). The urgency of labor law for informal sector workers in the welfare state concept: An evidence in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 11(6), 528–541.
- Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford University Press.
- Harvey, E. D., & Maus, K. E. (1990). *Soliciting Interpretation: Literary Theory and Seventeenth-Century English Poetry*. University of Chicago Press.
- Haspekian, M., Kieran, C., Drijvers, P., Bråting, K., & Tabach, M. (2024). Algebra Education and Digital Resources: A Long-Distance Relationship? In *Handbook of digital resources in mathematics education* (pp. 439–470). Springer.
- Havel, B. F., & Sanchez, G. S. (2014). *The principles and practice of international aviation law*. Cambridge University Press.
- Heuston, R. F. V. (1957). Donoghue v. Stevenson in retrospect. *The Modern Law Review*, 20(1), 1–24.
- Heyman, S. J. (1998). Righting the Balance: an Inquiry into the Foundations and Limits of Freedom of Expression. *BUL Rev.*, 78, 1275.
- Höffe, O. (2011). *Aristoteles: Politik*. Akademie Verlag.
- Hoffmann, Lord. (2009). The universality of human rights. *Judicial Studies Board Annual Lecture*, 19, 22–23.
- Holmes Jr, O. W. (1923). The life of the law has not been logic: it has been experience. *The Common Law*, 1.
- Holmes Jr, O. W. (2020). *The common law*. Routledge.
- Holmes, O. W. (1881). *The Common Law*. Little, Brown and Co.
- Honneth, A. (1993). *The critique of power: reflective stages in a critical social theory*. Mit Press.
- Honneth, A. (2014). *Disrespect: The normative foundations of critical theory*. John Wiley & Sons.

- Huang, J., & Tsai, K. S. (2022). Securing authoritarian capitalism in the digital age: The political economy of surveillance in China. *The China Journal*, 88(1), 2–28.
- Huang, P. C. C. (2009). *Chinese civil justice, past and present*. Rowman & Littlefield.
- Husa, J. (2022). *Interdisciplinary Comparative Law: Rubbing Shoulders with the Neighbours or Standing Alone in a Crowd*. Edward Elgar Publishing.
- Hutchinson, A. C. (2013). Some What If Thoughts: Notes on Donoghue v Stevenson. *Osgoode Hall LJ*, 51, 701.
- Jackson, J. P. (2005). Science for segregation: Race, law, and the case against Brown v. Board of Education, 2.
- Jackson, S. L. (2010). *An historical analysis of the Chicago public schools desegregation consent decree (1980-2006): Establishing its relationship with the brown v. board case of 1954 and the implications of its implementation on educational leadership*.
- Jain, G. L. (2022). 90 Years since the Snail in the Bottle: Donoghue v Stevenson. *Issue 4 Indian JL & Legal Rsch.*, 4, 1.
- Jany, J., & Jany, J. (2020). Hindu Law. *Legal Traditions in Asia: History, Concepts and Laws*, 233–264.
- Japar, M., Semendawai, A. H., & Fahrudin, M. (2024). Hukum Kesehatan Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 952–961.
- Johansen, B. (2023). *Contingency in a sacred law: legal and ethical norms in the Muslim fiqh* (Vol. 7). Brill.
- Johnson, P. E. (1998). *Reason in the Balance: The Case Against Naturalism in Science, Law Education*. InterVarsity Press.
- Jois, M. R. (2015). *Ancient Indian law: Eternal values in manu smriti*. Universal Law Publishing.
- Jois, R. (2004). *Legal and Constitutional History of India: Ancient, Judicial and Constitutional System*. Universal Law Publishing.
- Joseph, P. (2022). *Hindu women devotees and menstrual taboos: gender, agency and religion in the case of the Sabarimala temple*. Macquarie University.
- Kadish, S. H., Schulhofer, S. J., & Barkow, R. E. (2016). *Criminal law and its processes: Cases and materials*. Aspen Publishing.
- Kaemmerer, W. F., & Schwebel, A. I. (1976). Factors of the Rotter internal-external scale. *Psychological Reports*, 39(1), 107–114.
- Kalis, S. M. (2014). Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González: An entitlement to erasure and its endless effects. *Tul. J. Int'l & Comp. L.*, 23, 589.
- Kalman, L. (2016). *Legal realism at Yale, 1927-1960*. UNC Press Books.
- Kamali, M. H. (1993). Fundamental rights of the individual: An analysis of Haqq (right) in Islamic law. *American Journal of Islam and Society*, 10(3), 340–366.
- Kamali, M. H. (2011). Maqasid Al-Shari'ah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective. *ICR Journal*, 2(2), 245–271.
- Kamali, M. H. (2019). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Kammerhofer, J., & d'Aspremont, J. (2014). *International legal positivism in a post-*

- modern world*. Cambridge University Press.
- Kantor, M. (2005). The ICC Pre-Arbitral Referee Procedure: Momentum for Expanded Use. *Transnational Dispute Management (TDM)*, 2(5).
- Karenga, M. (2003). *Maat, the moral ideal in ancient Egypt: A study in classical African ethics*. Routledge.
- Katz, P. R. (2008). *Divine justice: Religion and the development of Chinese legal culture*. Routledge.
- Kelman, M. (1987). *A Guide to Critical Legal Studies*. Harvard University Press.
- Kelsen, H. (1935). The pure theory of law. *LQ Rev.*, 51, 517.
- Kelsen, H. (1941). Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence, The. *Harv. L. Rev.*, 55, 44.
- Kelsen, H. (1966). On the pure theory of law. *Israel Law Review*, 1(1), 1–7.
- Kennedy, D. (1997). *A Critique of Adjudication [fin de siècle]*. Harvard University Press.
- Kennedy, D. (2000). Duncan Kennedy, A Critique of Adjudication: Fin de Siecle. *Cardozo L. Rev.*, 22, 991.
- Kennedy, R. (1993). State, Criminal Law, and Racial Discrimination: A Comment, The. *Harv. L. Rev.*, 107, 1255.
- Kevelson, R. (2012). *The law as a system of signs*. Springer Science & Business Media.
- King, L. W. (2023). *Codex Hammurabi*. DigiCat.
- Klarman, M. J. (2007). *Brown versus board of education and the civil rights movement*. Oxford University Press.
- Kleefeld, J. C. (2013). The Donoghue Diaries. *Juridical Review*, 3, 375–450.
- Kluger, R. (2011). *Simple justice: The history of Brown v. Board of Education and Black America's struggle for equality*. Vintage.
- Knaus, T. (2023). Emotions in Media Education: How media based emotions enrich classroom teaching and learning. *Social Sciences & Humanities Open*, 8(1), 100504.
- Koskenniemi, M. (2005a). Global legal pluralism: multiple regimes and multiple modes of thought. *Palestra Pro-Ferida Em Harvard Em*, 5.
- Koskenniemi, M. (2005b). International law in Europe: between tradition and renewal. *European Journal of International Law*, 16(1), 113–124.
- Koskenniemi, M. (2021). *To the uttermost parts of the earth: Legal imagination and international power 1300–1870*. Cambridge University Press.
- Kramer, E. (1963). Judgment of personal characteristics and emotions from nonverbal properties of speech. *Psychological Bulletin*, 60(4), 408.
- Kramer, M. H. (2003). *In defense of legal positivism: law without trimmings*. Oxford University Press, USA.
- Krikorian, Y. H. (1944). *Naturalism and the human spirit*. Columbia University Press.
- Kumar, C. R. (2004). International human rights perspectives on the fundamental right to education-integration of human rights and human development in the Indian Constitution. *Tul. J. Int'l & Comp. L.*, 12, 237.
- Kumar, M. (2021). Hindu Law, Legal System, and Philosophy: A Discourse on Recontextualizing Legal Studies in India. *Legal System, and Philosophy: A*

- Discourse on Recontextualizing Legal Studies in India (July 5, 2021).*
- Kurland, P. B. (1979). *Brown v. Board of Education was the Beginning: School Desegregation Cases in the United States Supreme Court: 1954-1979.* *Wash. ULQ*, 309.
- Lattimer, M., & Sands, P. (2018). *The grey zone: Civilian protection between human rights and the laws of war.* Bloomsbury Publishing.
- Leiter, B. (2001). Legal realism and legal positivism reconsidered. *Ethics*, 111(2), 278–301.
- Leiter, B. (2010). Legal formalism and legal realism: What is the issue? *Legal Theory*, 16(2), 111–133.
- Lichtheim, M. (2006). *Ancient Egyptian Literature, Volume I: The Old and Middle Kingdoms* (Vol. 1). Univ of California Press.
- Liebenberg, S. (2010). *Socio-economic rights: Adjudication under a transformative constitution.* Juta and Company Ltd.
- Lind, D. (2020). Doctrines of Discovery. *Wash. U. Jurisprudence Rev.*, 13, 1.
- Lingat, R., & Derrett, J. D. M. (1973). *The classical law of India* (Vol. 2). University of California Press Berkeley.
- Lippmann, K. (2024). A Reduction in the Readily Releasable Vesicle Pool Impairs GABAergic Inhibition in the Hippocampus after Blood–Brain Barrier Dysfunction. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(13), 6862.
- Llewellyn, K. (1931). *Some Realism about Realism: Responding to Dean Pound.* Harvard Law Review.
- Llewellyn, K. (2017). *Jurisprudence: realism in theory and practice.* Routledge.
- Llewellyn, K. N. (1932). Behind the Law of Divorce: I. *Colum. L. Rev.*, 32, 1281.
- Lloyd, A. B. (2014). *Ancient Egypt: state and society.* OUP Oxford.
- Locke, J. (1967). *Two treatises of government.* Cambridge university press.
- Lucey, F. E. (1941). Natural Law and American Legal Realism: Their Respective Contributions to a Theory of Law in a Democratic Society. *Geo. LJ*, 30, 493.
- MacCormack, G. (1996). *The spirit of traditional Chinese law.* University of Georgia Press.
- MacCormick, N. (2005). *Rhetoric and the rule of law: a theory of legal reasoning.* OUP Oxford.
- MacCormick, N., & Weinberger, O. (1986). *An institutional theory of law: new approaches to legal positivism* (Vol. 3). Springer Science & Business Media.
- Madison, M. v. (2015). *The impact of Marbury v. Madison is consequential, which is beyond that specific controversy, ie, a delivery of Commission to several dozens of new appointees by new president (Marbury v. Madison, 1803). Several aspects can be highlighted touching on its .*
- Maine, H. (1861). *Ancient Law*, London. J. Murray. (Réed. London, Dent, 1972.).
- Maine, H. J. S. (2000). *Ancient law* (Issue 734). Beard Books.
- Maine, H. S. (1986). *Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society and Its Relation to Modern Ideas.* 1861. *New York: Dorset.*
- Makarov, I., Chen, H., & Paltsev, S. (2020). Impacts of climate change policies worldwide on the Russian economy. *Climate Policy*, 20(10), 1242–1256.
- Malinowski, B. (1926). *Myth in primitive psychology.* WW Norton.
- Malinowski, E. (1926). Linkage phenomena in wheat. *Journal of Genetics*, 17(2),

157–185.

- Malman, M. H. (2002). United States v. Manuel Noriega: Never Before, Never Again. *Litigation*, 28(2), 13–20.
- Mancini, A. (2002). *Ancient Egyptian wisdom for the Internet: ancient Egyptian justice and ancient Roman law applied to the Internet*. University Press of America.
- Mancini, A. (2004). *Maat revealed, Philosophy of justice in ancient Egypt*. BUENOS BOOKS AMERICA LLC.
- Mantouvalou, V., & Wolff, J. (2024). *Structural Injustice and the Law*. UCL Press.
- Marcuse's, H. (1964). *One dimensional man* (Vol. 1). Boston: Beacon Press.
- Markovits, D. (2011). *A modern legal ethics: adversary advocacy in a democratic age*. Princeton University Press.
- Marshall, W. (1803). *On planting and rural ornament: a practical treatise* (Vol. 2). Bulmer.
- Martin, D. (2001). *Nature, maat and myth in ancient Egyptian and Dogon cosmology*. Temple University.
- Martin, G., Bray, R. S., & Kumar, M. (2015). *Secrecy, Law, and Society*. Routledge Abingdon.
- Mason, A. (2003). Legislative and judicial law-making: Can we locate an identifiable boundary. *Adel. L. Rev.*, 24, 15.
- Mathebe, L. (2021). The Constitutional Court of South Africa: Thoughts on its 25-year-long legacy of judicial activism. *Journal of Asian and African Studies*, 56(1), 18–33.
- Mathews, A. S. (1986). *Freedom, state security, and the rule of law: Dilemmas of the apartheid society* (Vol. 42). Univ of California Press.
- McCarthy, T. (1993). *Ideals and illusions: On reconstruction and deconstruction in contemporary critical theory*. MIT Press.
- McCaughey, E. (1989). Marbury v. Madison: Have We Missed the Real Meaning? *Presidential Studies Quarterly*, 19(3), 491–528.
- McGee, R. J., & Warm, R. L. (2024). *Anthropological theory: An introductory history*. Rowman & Littlefield.
- McKenna, J. A., & Wiggins, E. C. (1997). Empirical research on civil discovery. *BCL Rev.*, 39, 785.
- Menski, W. (2001). *Postmodern Hindu Law*.
- Menski, W. (2008). *Hindu law: Beyond tradition and modernity*. Oxford University Press.
- Menski, W. (2012). Hindu law as a 'religious' system. In *Religion, Law and Tradition* (pp. 108–126). Routledge.
- Menski, W. (2019). *Hindu Law in Modern Times*. Oxford University Press Oxford.
- Merrill, T. W. (2003). Marbury v. Madison as the First Great Administrative Law Decision. *J. Marshall L. Rev.*, 37, 481.
- Merryman, J. H. (1998). *The Loneliness of the Common Lawyer*. Stanford University Press.
- Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2007). *The civil law tradition*, 3^a. Stanford Press, Stanford.
- Merryman, J., & Pérez-Perdomo, R. (2018). *The civil law tradition: an introduction*

- to the legal systems of Europe and Latin America. Stanford University Press.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi*.
- Mesarek, A. (2014). Google Spain SL, Google Inc. protiv Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González-Pravo „biti zaboravljen “Presuda Europskog suda. *Pravnik: Časopis Za Pravna i Društvena Pitanja*, 47(96), 149–157.
- Mignolo, W. D. (2000). The many faces of cosmo-polis: Border thinking and critical cosmopolitanism. *Public Culture*, 12(3), 721–748.
- Miller, R. J. (2010). *Discovering indigenous lands: The doctrine of discovery in the English colonies*. Oxford University Press.
- Milsom, S. F. C. (2003). *A natural history of the common law*. Columbia University Press.
- Milsom, S. F. C. (2014). *Historical foundations of the common law*. Butterworth-Heinemann.
- Mkhatshwa, E. J. (2007). *Grammatical analysis: its role in the reading of legal texts*.
- Moore, M. S. (2002). Legal reality: A naturalist approach to legal ontology. *Law & Phil.*, 21, 619.
- Morison, W. L. (1948). A Re-examination of the Duty of Care. *Mod. L. Rev.*, 11, 9.
- Mousourakis, G. (2015). *Roman law and the origins of the civil law tradition*. Springer.
- Mufid, A. (2020). Penguatan Hukum Adat di Era Modern: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 15(3), 235–250.
- Müller, U., & Bühler, L. (2001). *Magnetofluidynamics in channels and containers*. Springer Science & Business Media.
- Narula, R. (2020). Policy opportunities and challenges from the COVID-19 pandemic for economies with large informal sectors. *Journal of International Business Policy*, 3(3), 302–310.
- Nelson, W. E. (2018). *Marbury v. Madison: The Origins and Legacy of Judicial Review. Revised and Expanded*. University Press of Kansas.
- Neyers, J. W. (1999). Donoghue v. Stevenson and the Rescue Doctrine: A Public Justification of Recovery in Situations Involving the Negligent Supply of Dangerous Structures. *U. Toronto LJ*, 49, 475.
- Nikesh, A. (2020). The acceptance of social change in the Kerala society: The impact of religious traditionalism in the acceptance of the court verdict to legalize women’s entry at the Sabarimala temple in Kerala, India. *India*. (December 26, 2020).
- Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge.
- Nopyandri, N. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dalam perspektif UUD 1945. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7).
- Nugraheni, D. B., Ilhami, H., & Harahab, Y. (2010). Pengaturan dan implementasi wasiat wajibah di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 311–329.
- Nurdin, B., & Turdiev, K. (2021). Paradigm of justice in law enforcement in the philosophical dimensions of legal positivism and legal realism. *Lex Publica*, 8(2), 65–74.

- Nyazee, I. A. (2003a). Islamic law and human rights. *Islamabad Law Review*, 1, 1.
- Nyazee, I. A. (2003b). Islamic Law and the CRC (Convention on the Rights of the Child). *Islamabad Law Review*, 1, 1.
- Oguamanam, C. (2006). *International law and indigenous knowledge: Intellectual property, plant biodiversity, and traditional medicine*. University of Toronto Press.
- Orebech, P. (2005). *The role of customary law in sustainable development*. Cambridge University Press.
- Pangle, K. L., Sutton, T. M., & Brown, P. B. (2003). Evaluation of practical and natural diets for juvenile lake herring. *North American Journal of Aquaculture*, 65(2), 91–98.
- Parasol, M. (2018). The impact of China's 2016 Cyber Security Law on foreign technology firms, and on China's big data and Smart City dreams. *Computer Law & Security Review*, 34(1), 67–98.
- Pashukanis, E. B. (1978). *Law and Marxism: A General Theory*. Ink Links.
- Patterson, J. T., & Freehling, W. W. (2001). *Brown v. Board of Education: A civil rights milestone and its troubled legacy*. Oxford University Press.
- Peerenboom, R. (2002). *China's Long March toward Rule of Law*. Cambridge University Press.
- Pierce, A. (2005). *Brown v. Board of Education*. ABDO.
- Pinto, R., Albuquerque, S., de Castro, M. V., Levendosky, A. A., Fonseca, M., Jongenelen, I., Maia, Â., & Gamito, P. (2024). A Virtual Reality Simulation to Examine the Relationship Between Post-Traumatic Stress Symptoms and Decision-Making in First Responders. *Journal of Trauma & Dissociation*, 25(5), 597–612.
- Piranda, A. P., Rosra, D., & Iffan, A. (2023). Pelanggaran Ham Berat Terhadap Etnis Uighur Ditinjau Dari Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) 1948. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, 14(2), 1–6.
- Plato, Ferrari, G. R. F., Griffith, T., & Plato. (2000). *The republic*. Cambridge University Press Cambridge.
- Plato, P. (2008). *The republic* (Vol. 7). Wiley Online Library.
- Pleasence, P., Balmer, N., & Buck, A. (2006). *Causes of action: Civil law and social justice*. The Stationery Office.
- Poesoko, H., & Dewi, A. A. S. L. (2020). The Role of Legal Opinion as Legal Problem Solving Method. *Sociological Jurisprudence Journal*, 3(1), 19–27.
- Porter, J. (2005). *Nature as reason: A Thomistic theory of the natural law*. Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Posner, R. A. (2009). *The problematics of moral and legal theory*. Harvard University Press.
- Posner, R. A. (2013). Legal formalism, legal realism, and the interpretation of statutes and the constitution. In *Precedents, Statutes, and Analysis of Legal Concepts* (pp. 145–183). Routledge.
- Pound, R. (1910). *Law in Books and Law in Action*. American Law Review.
- Pound, R. (1921). *Readings on the History and System of the Common Law*. Chipman Law Publishing Company.

- Pound, R. (1959). *The Spirit of the Common Law*. Yale University Press.
- Pound, R. (2018). *The spirit of the common law*. Routledge.
- Prendergast, C. (2003). *Literacy and racial justice: The politics of learning after Brown v. Board of Education*. SIU Press.
- Priel, D. (2008). Were the legal realists legal positivists? *Law and Philosophy*, 27(4), 309–350.
- Prince, J. D. (1904). *The code of Hammurabi*. University of Chicago Press.
- Radin, M. (1937). The Roman law of quasi-contract. *Virginia Law Review*, 241–258.
- Ramadan, H. M. (2006). *Understanding Islamic law: from classical to contemporary*. Rowman Altamira.
- Rani, F. (2020). *Pendidikan Hukum Islam di Masyarakat Indonesia*. Jurnal Pendidikan Hukum.
- Rasak, M. A. M., & Shehu, F. (2024). Investigating Yūsuf al-Qaradāwī's Approach Towards Inter-Religious Encounters in the Light of His Teachings and Writings. *Dirosat: Journal of Education, Social Sciences & Humanities*, 2(4), 297–309.
- Rawls, J. (2017). A theory of justice. In *Applied ethics* (pp. 21–29). Routledge.
- Raz, J. (1979). *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford University Press.
- Redford, M. (2011). US and EU Legislation on Cybercrime. *2011 European Intelligence and Security Informatics Conference*, 34–37.
- Robinson, O. F. (2006). *The sources of Roman law: problems and methods for ancient historians*. Routledge.
- Rocher, L. S. (1978). Los 'conventus iuridici' en la Hispania Romana. *Caesaraugusta*, 45, 171–194.
- Roffer, M. H. (2015). *The law book: from Hammurabi to the International Criminal Court, 250 milestones in the history of law*. Union Square & Co.
- Rosen, G. E., & Harding, K. W. (2001). Reflections upon Judicial Independence as We Approach the Bicentennial of Marbury v. Madison: Safeguarding the Constitution's Crown Jewel. *Fordham Urb. LJ*, 29, 791.
- Rosen, L. (1989). *The anthropology of justice: Law as culture in Islamic society* (Vol. 1985). Cambridge University Press.
- Rubinfeld, J. (2005). *Revolution by Judiciary: The Structure of American Constitutional Law*. Harvard University Press.
- Salam, S. (2019). Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 885–896.
- Salize, H. J., Stamm, K., Schubert, M., Bergmann, F., Härter, M., Berger, M., Gaebel, W., & Schneider, F. (2004). Cost of care for depressive disorders in primary and specialized care in Germany. *Psychiatrische Praxis*, 31(3), 147–156.
- Santos, B. d. S. (2002). *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation*. Routledge.
- Sarat, A. (1997). *Race, law, and culture: Reflections on Brown v. Board of Education*. Oxford University Press.
- Sarat, A. D., & Simon, J. (2003). *Cultural analysis, cultural studies, and the law: Moving beyond legal realism*. Duke University Press.
- Sarbah, J. M. (1897). *Fanti customary laws: a brief introduction to the principles of*

- the native laws and customs of the Fanti and Akan sections of the Gold Coast, with a selection of cases thereon decided in the law courts.* W. Clowes and Sons.
- Sarojni, L. (2022). *Donoghue v Stevenson* (1932). *Jus Corpus LJ*, 3, 21.
- Schäfer, H.-B., & Ott, C. (2022). *The economic analysis of civil law*. Edward Elgar Publishing.
- Schauer, F. (2009). *Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning*. Harvard University Press.
- Schauer, F. (2012). Legal realism untamed. *Tex. L. Rev.*, 91, 749.
- Schlegel, J. H. (1995). *American legal realism and empirical social science*. Univ of North Carolina Press.
- Schockenhoff, E. (2003). *Natural law & human dignity: Universal ethics in an historical world*. CUA Press.
- Schweiker, E. M. (1993). *United States v. Noriega: Conflicts between the First Amendment and the Rights to a Fair Trial and Privacy*. *U. Chi. Legal. F*, 369.
- Scotford, E. (2017). *Environmental principles and the evolution of environmental law*. Bloomsbury Publishing.
- Shapiro, D. D., Karam, J. A., Zemp, L., Master, V. A., Sexton, W. J., Ghasemzadeh, A., Schmeusser, B. N., Davaro, F., Peak, T., & Patil, D. (2023). Cytoreductive nephrectomy following immune checkpoint inhibitor therapy is safe and facilitates treatment-free intervals. *European Urology Open Science*, 50, 43–46.
- Shapiro, J. (2011). *1599: A Year in the Life of William Shakespeare: Winner of the Baillie Gifford Winner of Winners Award 2023*. Faber & Faber.
- Shaw, H. H. (1903). *The First Maine Heavy Artillery, 1861-1865: A History of Its Part and Place in the War for the Union, with an Outline of Causes of War and Its Results to Our Country*.
- Shklar, J. N. (1986). *Legalism: Law, morals, and political trials*. Harvard University Press.
- Siltala, R. (2000). *A theory of precedent: from analytical positivism to a post-analytical philosophy of law*. Hart Publishing.
- Simon, W. H. (2009). *The practice of justice: a theory of lawyers' ethics*. Harvard University Press.
- Small, A. R. (1886). *The Sixteenth Maine Regiment in the War of the Rebellion, 1861-1865*. B. Thurston & Company.
- Smith, J. C., & Burns, P. (1983). *Donoghue v. Stevenson: The not so golden anniversary*. *The Modern Law Review*, 46(2), 147–163.
- Smith, J. H., & Singh, M. (2024). Forensic DNA Profiling: Legal and Ethical Considerations. *Journal of Scientific Research and Reports*, 30(5), 141–144.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Sophar Maru Hutagalung, S. H. (2022). *Kontrak bisnis di ASEAN: pengaruh sistem hukum common law dan civil law*. Sinar Grafika.
- Sorokin, P. (2017). *Social and cultural dynamics: A study of change in major systems of art, truth, ethics, law and social relationships*. Routledge.
- Southern, H. N. (1970). The natural control of a population of Tawny Owls (*Strix aluco*). *Journal of Zoology*, 162(2), 197–285.
- Southwood, T. R. E., Moran, V. C., & Kennedy, C. E. J. (1982). The richness,

- abundance and biomass of the arthropod communities on trees. *The Journal of Animal Ecology*, 635–649.
- Spaak, T., & Spaak, T. (2014). Legal Realism and Legal Positivism. *A Critical Appraisal of Karl Olivecrona's Legal Philosophy*, 241–259.
- Sparks, C. S., & Jantz, R. L. (2003). Changing times, changing faces: Franz Boas's immigrant study in modern perspective. *American Anthropologist*, 105(2), 333–337.
- Stephan, W. G. (1978). School desegregation: An evaluation of predictions made in Brown v. Board of Education.. *Psychological Bulletin*, 85(2), 217.
- Stuart, D. (2008). Charter Standards for Investigative Powers: Have the Courts Got the Balance Right? *The Supreme Court Law Review: Osgoode's Annual Constitutional Cases Conference*, 40(1), 2.
- Stuntz, W. J. (1994). Privacy's Problem and the Law of Criminal Procedure. *Mich. L. Rev.*, 93, 1016.
- Sultana, N., Rahman, M. M., & Khanam, R. (2022). Informal sector employment and economic growth: Evidence from developing countries in SDG perspective. *Sustainability*, 14(19), 11989.
- Susilo, E. B., Susilowati, T., & Zaini, N. A. (2024). The Urgency of Strengthening Judges' Authority in the Rechtvinding Process. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 95–104.
- Susskind, R., & Susskind, D. (2022). *The future of the professions: How technology will transform the work of human experts*. Oxford University Press.
- Sweet, A. S. (2004). *The judicial construction of Europe*. Oxford University Press.
- Sykes, J. P., Wright, J. P., & Trench, A. (2016). Discovery, supply and demand: From Metals of Antiquity to critical metals. *Applied Earth Science*, 125(1), 3–20.
- Sykes, K. (2016). The appeal to science and the formation of global animal law. *European Journal of International Law*, 27(2), 497–518.
- Tamanaha, B. Z. (1997). *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and a Social Theory of Law*. Oxford University Press.
- Tessuto, G. (2016). *Constructing legal discourses and social practices: Issues and perspectives*. Cambridge Scholars Publishing.
- Teubner, G. (1997). *Breaking frames: the global interplay of legal and social systems*. JSTOR.
- Thomas, E. W. (2005). *The judicial process: realism, pragmatism, practical reasoning and principles*. Cambridge University Press.
- Tobie, E. P. (1887). *History of the First Maine Cavalry, 1861-1865*. Press of Emery & Hughes.
- Tobin, B. (2014). *Indigenous peoples, customary law and human rights-why living law matters*. Routledge.
- Tran, L. T. H., Ho, T., Ho, H. T., & Phung, N. D. (2024). Climate vulnerability and capital structure: Moderating effect of financial development, financial constraints, and 2015 Paris Agreement. *International Review of Economics & Finance*, 96, 103711.
- Tu, W. (1996). *Confucian traditions in East Asian modernity: Moral education and economic culture in Japan and the four mini-dragons*. Harvard University Press.

- Tuomala, J. C. (2015). *Marbury v. Madison and the Foundation of Law*. *Liberty University Law Review*, 4(2), 3.
- Tuori, K. (2017). *Critical legal positivism*. Routledge.
- Tushnet, M. (1984). Critical Legal Studies: A Political History. *Yale Law Journal*.
- Tushnet, M. (2003). *Marbury v. Madison around the world*. *Tenn. L. Rev.*, 71, 251.
- Tushnet, M. (2022a). *American Legal Realism Today: An Idiosyncratic Restatement*.
- Tushnet, M. (2022b). Institutions for realizing popular constitutionalism. *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law/Revija Za Ustavno Teorijo in Filozofijo Prava*, 47.
- Tutik, T. (2013). T., "Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 43(2).
- Tyldesley, M. (1996). The House of Industry League: Guild Socialism in the 1930s and 1940s. *Labour History Review*, 61(3), 309–321.
- Uma, S. (2021). Menstrual "impurity", women's access to public worship and the law: a feminist re-writing of the Sabarimala judgement *S. Mahendran v The Secretary, Travancore Devaswom Board* AIR 1993 Ker 42. *Indian Law Review*, 5(3), 288–309.
- Underhay, F. C. (1936). Manufacturers' Liability: Recent Developments of Donoghue V. Stevenson. *Can. B. Rev.*, 14, 283.
- Underhay, F. C. (1937). Manufacturers' Liability: Recent Developments of Donoghue V. Stevenson. *S. African LJ*, 54, 52.
- Unger, R. M. (1986). *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard University Press.
- Upham, F. K. (2009). *Law and social change in postwar Japan*. Harvard University Press.
- Vaidhyathan, S. (2018). *Antisocial media: How Facebook disconnects us and undermines democracy*. Oxford University Press.
- Vermeule, A. (2006). *Judging under uncertainty: an institutional theory of legal interpretation*. Harvard University Press.
- Vetter, B. K. (2004). The historical development of some important methods of manumission in Roman Law. *Notes*, 36, 37.
- Voigt, C. (2013). *Rule of law for nature: new dimensions and ideas in environmental law*. Cambridge University Press.
- Von Gontard, A., Baeyens, D., Van Hoecke, E., Warzak, W. J., & Bachmann, C. (2011). Psychological and psychiatric issues in urinary and fecal incontinence. *The Journal of Urology*, 185(4), 1432–1437.
- Wacks, R. (2014). *Philosophy of law: a very short introduction* (Vol. 147). Oxford University Press, USA.
- Wahanze, R. (2023). Examining the "Neighbour Principle" in Donoghue V Stevenson as a Test for Qualifying the Duty of Care Element Used in Determining the Liability of a Defendant in Negligent Misstatements. *Available at SSRN 4612565*.
- Wang, Y. (2010). *Harmony and war: Confucian culture and Chinese power politics*. Columbia University Press.
- Werksman, J., Cameron, J., & Roderick, P. (2014). *Improving compliance with*

- international environmental law*. Routledge.
- White, G. E. (1986). From realism to critical legal studies: A truncated intellectual history. *SW LJ*, 40, 819.
- Wintgens, L. J. (2013). *The law in philosophical perspectives: my philosophy of law* (Vol. 41). Springer Science & Business Media.
- Wolff, T. H. W. (1980). *Law and the administration of justice in the Old Testament and ancient East*. Minneapolis: Augsburg Publishing.
- Wolfrum, R., & Matz, N. (2003). *Conflicts in international environmental law* (Vol. 164). Springer Science & Business Media.
- Woodard, C. (1968). The limits of legal realism: An historical perspective. *Virginia Law Review*, 689–739.
- Wright, D. P. (2009). *Inventing God's law: how the covenant code of the Bible used and revised the laws of Hammurabi*. OUP USA.
- Wróblewski, J. (2013). *The judicial application of law* (Vol. 15). Springer Science & Business Media.
- Zeng, J. (2022). *Artificial intelligence with Chinese characteristics: National strategy, security and authoritarian governance*. Springer.
- Zhong, N. S., Zheng, B. J., Li, Y. M., Poon, L. L. M., Xie, Z. H., Chan, K. H., Li, P. H., Tan, S. Y., Chang, Q., & Xie, J. P. (2003). Epidemiology and cause of severe acute respiratory syndrome (SARS) in Guangdong, People's Republic of China, in February, 2003. *The Lancet*, 362(9393), 1353–1358.
- Zimmermann, A., Tams, C. J., Oellers-Frahm, K., & Tomuschat, C. (2019). *The statute of the International Court of Justice: a commentary*. Oxford University Press.
- Zirkel, S., & Cantor, N. (2004). 50 years after Brown v. Board of Education: The promise and challenge of multicultural education. *Journal of Social Issues*, 60(1), 1–15.
- Zweigert, K. (1998). An Introduction to Comparative Law. *Clarendon Pre-Ss*.